

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

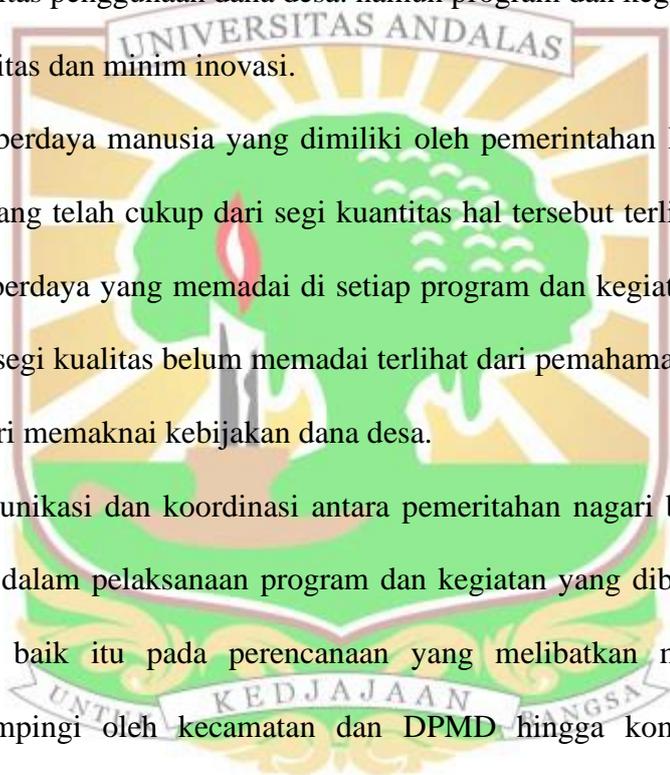
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan dana desa di Nagari Taruang Taruang kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok. Berdasarkan hasil uraian peneliti berupa wawancara yang peneliti lakukan dengan informan dan dokumentasi peneliti, serta pembahasan mengenai permasalahan yang dikaitkan dengan teori implementasi Van Meter dan Van Horn maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian implementasi kebijakan dana desa sudah berjalan dengan baik namun belum mencapai tujuan kebijakan secara optimal.

Meskipun terdapat beberapa variabel yang telah berjalan semestinya, namun masih terdapat variabel yang belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintahan Nagari Taruang Taruang yaitu terutama dalam pemahaman tujuan kebijakan sehingga program dan kegiatan yang dilakukan belum berdampak nyata bagi masyarakat akan tetapi pada setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaporan telah dilaksanakan sesuai regulasi yang mengatur. Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan dana desa di Nagari Taruang Taruang kecamatan IX Koto Sungai Lasi kabupaten solok yang telah peneliti uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan dana desa merupakan sarana pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan desa yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian masyarakat dan memperkuat masyarakat sebagai subjek

pembangunan. Namun hal tersebut masih dipahami oleh sebagian pemerintahan nagari, sehingga terjadi multi-interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan dana desa di Nagari Taruang Taruang.

2. Pemerintahan Nagari Taruang Taruang telah melaksanakan kebijakan dana desa berdasarkan regulasi yang mengatur, baik itu dari perodesasi anggaran hingga pada program dan kegiatan yang sesuai dengan pedoman prioritas penggunaan dana desa. namun program dan kegiatan cenderung rutinitas dan minim inovasi.
3. Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh pemerintahan Nagari Taruang Taruang telah cukup dari segi kuantitas hal tersebut terlihat dari jumlah sumberdaya yang memadai di setiap program dan kegiatan. Akan tetapi dari segi kualitas belum memadai terlihat dari pemahaman pemerintahan nagari memaknai kebijakan dana desa.
4. Komunikasi dan koordinasi antara pemeritahan nagari berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa baik itu pada perencanaan yang melibatkan masyarakat dan didampingi oleh kecamatan dan DPMD hingga komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan apabila terjadi hambatan atau permasalahan yang dihadapi.
5. Dukungan dari masyarakat sangat baik terhadap program dan kegiatan terlihat dari antusias masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan tetapi rendah dalam tahap perencanaan masih rendah



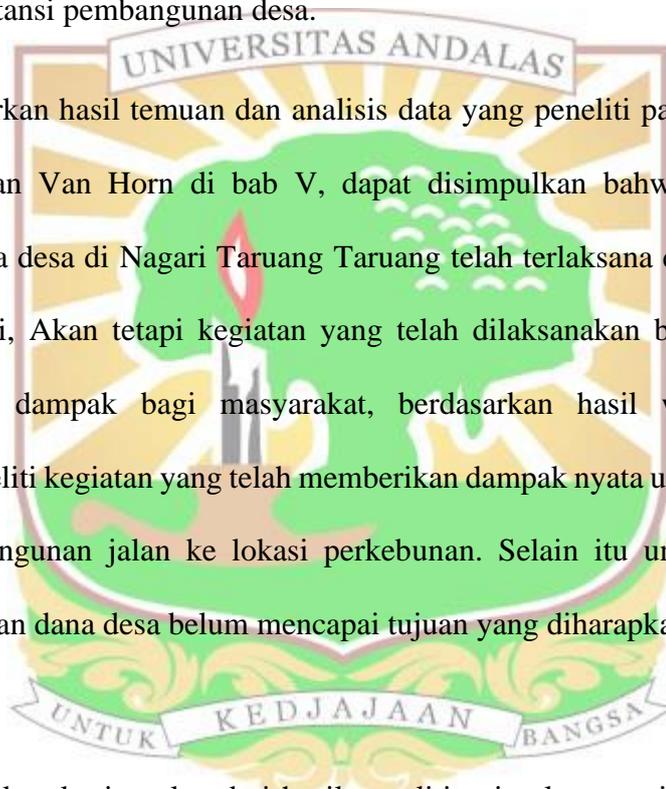
karena tahap perencanaan masyarakat cenderung pasif dan tidak aktif menyuarakan.

6. Pemerintah Kabupaten Solok mendukung pelaksanaan kebijakan dana desa terlihat dari adanya dukungan regulasi yang lengkap dari pihak kabupaten dan dilakukannya pelatihan untuk wali nagari dan kaur keuangan dalam teknik pengelolaan keuangan desa tetapi tidak pada substansi pembangunan desa.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data yang peneliti paparkan menurut Van Meter dan Van Horn di bab V, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Nagari Taruang Taruang telah terlaksana dengan baik dan sesuai regulasi, Akan tetapi kegiatan yang telah dilaksanakan belum semuanya menghasilkan dampak bagi masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti kegiatan yang telah memberikan dampak nyata untuk masyarakat adalah pembangunan jalan ke lokasi perkebunan. Selain itu untuk pencapaian tujuan kebijakan dana desa belum mencapai tujuan yang diharapkan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian implementasi kebijakan dana desa di Nagari Taruang Taruang kecamatan IX Koto Sungai Lasi kabupaten Solok yang telah peneliti kemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan implementasi kebijakan ini. Saran-saran tersebut sebagai berikut :



1. Melakukan rapat dan diskusi antara pemerintahan Nagari Taruang Taruang terkait kejelasan tujuan kebijakan sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi terkait tujuan kebijakan yang ingin dicapai.
2. Melakukan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan dana desa sehingga pemahaman masyarakat terkait kebijakan dana desa bertambah.
3. Pemerintahan Nagari Taruang Taruang sebaiknya melaksanakan kegiatan yang bersifat pembangunan ekonomi seperti BUMNag untuk mempercepat pembangunan ekonomi nagari dan sebaiknya lebih banyak melaksanakan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat
4. Pemerintah Nagari, Pemerintah Kabupaten Solok dan Provinsi Sumatera Barat sebaiknya memberikan pelatihan terkait pembangunan desa tidak hanya teknis keuangan desa serta pelatihan diberikan kepada seluruh perangkat nagari.
5. Selain melihat program dan kegiatan dari sisi kesesuaian dengan regulasi pemerintah nagari harus mendahulukan sisi kebermanfaatan program.
6. Peran pendamping desa harus dioptimalkan sehingga bisa menjadi wadah nagari untuk berdiskusi terkait pelaksanaan kebijakan yang efektif.

